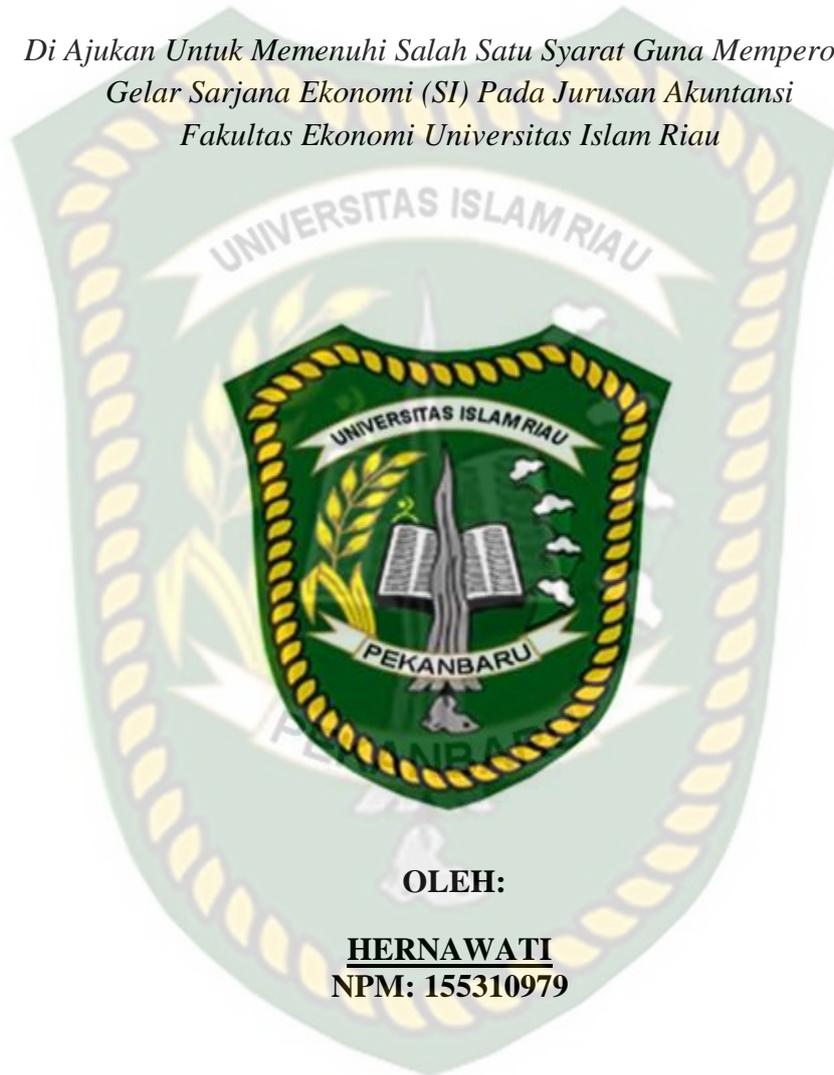


**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA  
SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK**

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SI) Pada Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



**OLEH:**

**HERNAWATI**  
**NPM: 155310979**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK**

**Oleh:**

**HERNAWATI**

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah sesuai dengan IAI-KASP (2015) tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.

Data yang digunakan peneliti pada Desa Sungai Kayu Ara adalah data primer dan sekunder. Dimana Data Primer adalah data yang pertama dicatat atau dikumpulkan secara langsung bagian keuangan Desa Sungai Kayu Ara. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk dokumen data-data mengenai laporan keuangan, struktur organisasi serta dokumen yang terkait dengan perencanaan dan pengelola keuangan desa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan Metode Deskriptif.

Dari analisis data yang dilakukan peneliti atas ditemui masalah bahwa Penerapan Akuntansi pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum sesuai dengan IAI-KASP (2015) Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

Kata Kunci : Penerapan Akuntansi Keuangan Desa, IAI-KASP (2015) dan Prinsip Akuntansi Beterima Umum

## **ABSTRACT**

### **AN ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING IN SUNGAI KAYU ARA VILLANGE SUNGAI APIT DISTRICT SIAK REGENCY**

**By:**

**HERNAWATI**

This research was conducted in Sungai Kayu Ara Village Sungai Apit District Siak Regency which aims to determine whether the Application of Financial Accounting in Sungai Kayu Ara Village Sungai Apit District Siak Regency was in accordance with IAI-KASP (2015) regarding Guidelines for Village Financial Accounting Assistance.

The data used by researchers in Sungai Kayu Ara Village are primary and secondary data. Where primary data is the first data recorder or collected directly in the financial section of Sungai Kayu Ara Village. Secondary Data is data obtained in the form of data documents regarding financial statements, organazational structure and documents related to village financial planning and management. Data collection techniques using interview and documentation techniques. While the data analysis technique uses descriptive method.

From the data analysis conducted by researchers found that the application of Accounting in Sungai Kayu Ara Village, Sungai Apit Subdistrict, Siak Regency is not in accordance with IAI-KASP (2015) Regarding Guidelienes for Assistance in Village Financial Accounting ang General Accepting Accounting Principles.

**Keywords:** Aplication of Village Financial Accounting, IAI-KASP (2015) and General Accepted Accounting Principles.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisannya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Terima Kasih Untuk Bapak **Drs. H. Abrar, M.Si., AK., CA** sebagai Dekan di Fakultas Ekonomi dan seluruh staf dan rekan dari Fakultas Ekonomi.
2. Yang terhormat Ibu **Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si, Ak., CA** selaku ketua Prodi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Terima Kasih kepada Bapak **Hariswanto, SE., M.Si, Ak, CA., CPA** selaku pembimbing yang telah membantu, mensupport dan memberi motivasi dalam membimbing skripsi ini hingga selesai.

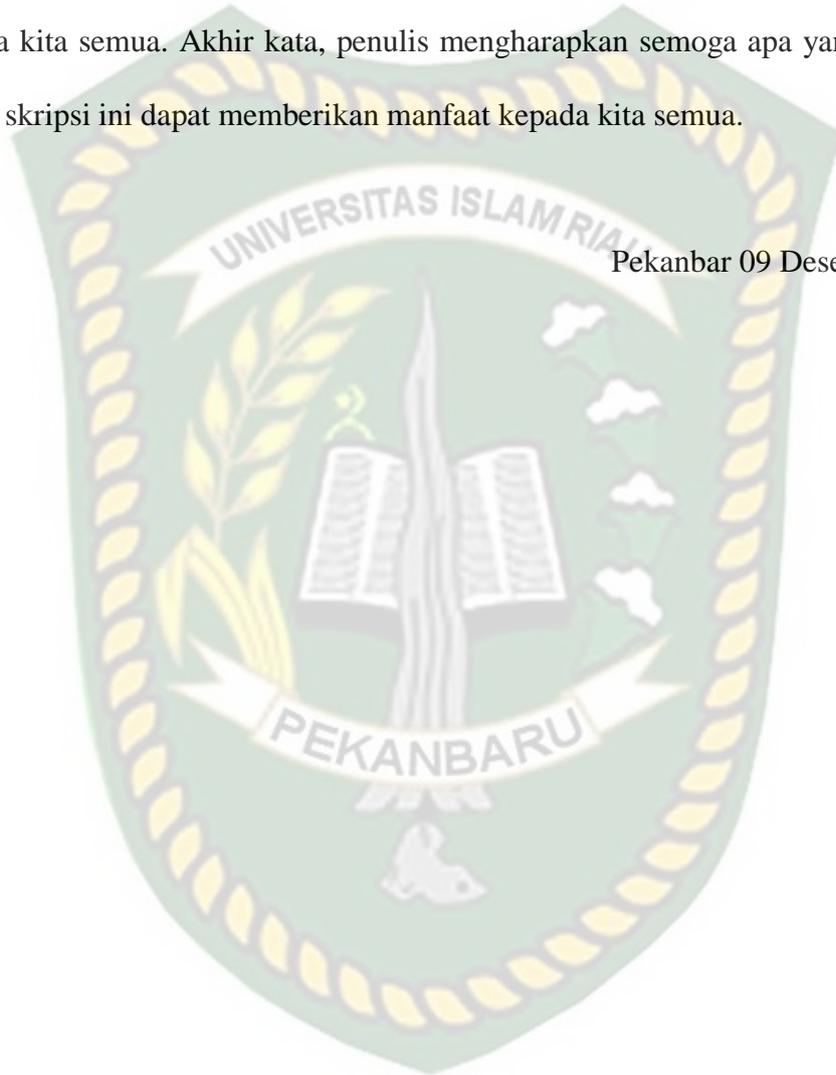
4. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang mana memberikan motivasi, pikiran, bimbingan serta arahan selama saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses penelitian yaitu Bapak Baharudin selaku Kepala Desa, Bapak Kerani selaku Sekretaris Desa, dan Kakak Febriani selaku Bendahara Desa serta petugas desa yang selalu memberikan pelayanan yang ramah pada saat penulis mengambil laporan keuangan dan data dalam proses penelitian.
6. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda **Ramlis Budiana**, dan Ibunda **Alm Halimah** terima kasih atas doa, nasehat, kasih sayang, semangat, pengorbanan dan bantuan yang tiada ternilai harganya yang telah Ayah dan Ibu berikan dan juga terimakasih buat ibu **Rosida** yang selalu memberi semangat dan motivasi, buat abang ku **Radius Saputra, Rizwan Efendi SE**, kakak ipar **Nurasanah S.Pd**. Terima kasih atas doa, nasehat, kasih sayang dan bantuannya. Begitu juga dengan Paman, Bibi dan semua keluarga besar lainnya.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman – teman **Eka Wahyuni, Surani Andriani SE, Jumrotul Aini SE**, yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Terimakasih juga penulis ucapkan untuk **Nazura, Ratna, Ririn, Shelly** yang selalu memberikan semangat dan doa nya.
9. Terkhusus untuk sahabat ku, my roommate **Titik Fajariah. S.Pd** terimakasih sudah menjadi pendengar setia dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini, yang selalu membantu dalam segala masalah perkuliahan.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan membalas dengan kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis, serta rahmat dan hidayahnya selalu tercurah kepada kita semua. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

Pekanbar 09 Desember 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II :TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....</b>	<b>9</b>
A. Telaah Pustaka.....	9
1. Pengertian Akuntansi .....	9
2. Pengertian Desa.....	11
3. Pengelolaan Keuangan Desa .....	11
4. Pengertian Akuntansi Keuangan Desa .....	14

a.	Aspek-aspek dan Karakteristik Akuntansi Keuangan Desa.....	15
b.	Pengguna Akuntansi Keuangan Desa .....	16
c.	Prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan Desa .....	17
5.	Persamaan Akuntansi Keuangan Desa .....	18
6.	Siklus Akuntansi Keuangan Desa .....	21
7.	Dasar Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi .....	22
a.	Sistem Pencatatan .....	22
b.	Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa .....	23
8.	Azas Pengelolaan Desa.....	23
9.	Laporan Keuangan Desa.....	25
10.	Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa .....	28
11.	Laporan Kekayaan Milik Desa.....	29
B.	Hipotesis.....	29
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A.	Lokasi Penelitian .....	30
B.	Jenis Data dan Sumber Data.....	30
C.	Teknik Pengumpulan Data .....	31
D.	Teknik Analisis Data .....	31
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI KAYU ARA .....</b>	<b>32</b>
A.	Sejarah Singkat Desa Sungai Kayu Ara.....	32

B. Struktur Organisasi.....	36
C. Visi dan Misi .....	38
D. Kebijakan Desa .....	40
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi .....	41
B. Tahap Pencatatan.....	41
C. Tahap Penggolongan .....	44
D. Tahap Pengihktisaran .....	45
E. Pengumpulan Data Penyesuaian.....	46
F. Penyusunan Laporan Keuangan .....	48
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel V.1	Buku Kas Umum-Tunai.....	42
Tabel V. 2	Buku Kas Pembantu Pajak.....	43
Tabel V. 3	Buku Bank Desa.....	44



## DAFTAR GAMBAR

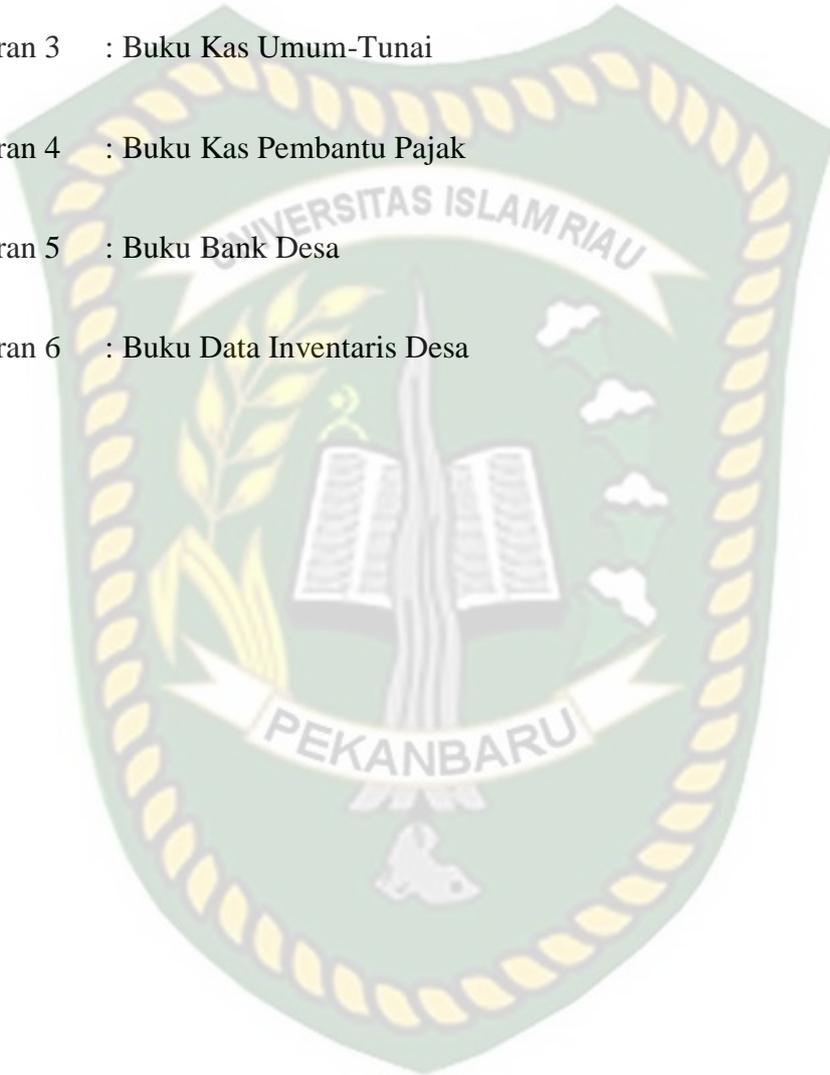
Gambar IV. I Struktur Organisasi .....	37
--	----



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
- Lampiran 2 : Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran 3 : Buku Kas Umum-Tunai
- Lampiran 4 : Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran 5 : Buku Bank Desa
- Lampiran 6 : Buku Data Inventaris Desa



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah maupun dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kita dapat simpulkan apa yang sebelumnya diatur pada UU No 6 Tahun 2014 diantaranya: Pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penantausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Permedagri.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penantausahaan, laporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga desa diharapkan dapat mengelola keuangannya tersebut lebih baik. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan berskala Desa didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi kualitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Sedangkan akuntansi desa adalah pencatatan dari

proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa yaitu Masyarakat desa, Perangkat desa, Pemerintahan daerah, Pemerintahan pusat.

Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam menyusun laporan keuangan desa Sungai Kayu Ara berpedoman pada UU No.6 pada Tahun 2014 tentang Desa, UU No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta IAI-KASP 2015.

Pada tahun 2017 pendapatan transfer dari pemerintah Desa Sungai Kayu Ara adalah sebesar Rp. 1.846.284.828,00. Bukti transaksi penerimaan dan penarikan dana yang diterima bendahara desa biasanya berupa rekening giro yang diminta kepada pihak bank yang bersangkutan dan kemudian bukti tersebut disimpan.

Penyusunan laporan keuangan pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak berbasis pada basis kas (*cash basic*). Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat pengeluaran dan biaya di catat pada saat penerimaan kas.

Proses akuntansi yang dilakukan pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dengan mengumpulkan transaksi dilakukan pencatatan berupa pembuatan Buku Kas Umum (Lampiran 3). Dalam buku kas umum terdapat kode rekening, penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo. Kemudian membuat Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 4) untuk membantu Buku Kas Umum mengenai penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak serta Buku Bank (Lampiran 5) untuk membantu buku kas mengenai penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan bank. Untuk melengkapi catatan agar lebih jelas berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes (Lampiran 1) untuk mengetahui Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 2) Serta membuat buku daftar inventaris (Lampiran 6) yang menyajikan daftar asset tetap yang ada di Desa Sungai Kayu Ara.

Laporan Kekayaan Milik Desa disusun untuk mengetahui jumlah kekayaan bersih desa, Laporan Kekayaan Milik Desa disajikan komparatif dengan tahun sebelumnya dan investarisasi Aset Desa. Asset desa terdiri dari 2 pertama asset lancar yang terdiri dari dari kas dan bank, piutang serta persediaan. Kedua asset tetap adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan lainnya yang sah. Asset tetap milik Desa Sungai Kayu Ara terdiri dari tanah, peralatan dan mesin,gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan instalasi. Laporan Kekayaan Milik Desa Sungai

Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tidak melakukan perhitungan atas akumulasi penyusutan terhadap asset tetap.

Berdasarkan proses akuntansi yang dilakukan di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak terdapat permasalahan yaitu tidak membuat jurnal umum serta tidak memposting ke Buku Besar yang merupakan media pencatatan transaksi sesuai dengan terjadinya transaksi pada Buku Kas Umum menurut IAI-KASP 2015.

Selain Itu Desa Sungai Kayu Ara tidak menghitung nilai persediaan pada akhir periode. Pada tahun 2017 belanja barang dan jasa (persediaan benda pos dan materai dengan biaya pengeluaran sebesar Rp.1.800.000, persediaan alat tulis kantor sebesar Rp.14.021.100 Dapat dilihat dilampiran 2) dan pada tahun 2016 belanja barang dan jasa (persediaan alat dan tulis kantor sebesar Rp.9.580.500 Dapat dilihat pada lampiran 2) dan lainnya sehingga saldo pada Laporan Kekayaan Milik Desa Sungai Kayu Ara nol (0)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik menganalisis masalah penerapan akuntansi dengan melakukan penelitian dalam bentuk proposal berjudul : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA SUNGAI KAYU ARA KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut: “Apakah Penerapan Akuntansi Keuangan Desa yang diterapkan Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Beterima Umum”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dilaksanakan untuk Kesesuaian Penerapan Akuntansi Desa Sungai Kayu Ara dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam hal penerapan akuntansi pada Desa Sungai Kayu Ara
2. Bagi Kantor Desa Sungai Kayu Ara dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan akuntansi dan dalam penyusunan laporan keuangan.
3. Bagi peniliti yang lain dapat dijadikan referensi untuk meneliti pada masa yang akan datang.

## **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulis membagikan menjadi enam bab yaitu sebagai berikut:

## BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan meliputi Latar Belakang Masalah, Tujuan dan manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

## BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis, menjelaskan teori-teori yang telah diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Lokasi Penelitian dan Jenis Dan Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

## BAB IV GAMBARAN UMUM DESA

Bab ini berisikan Sejarah Singkat Desa, Visi dan Misi, Struktur Organisasi Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yaitu tentang Sistem Pencatatan dan Pengakuan Akuntansi, Proses Akuntansi, dan Penyajian Laporan Keuangan.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan, dan kemudian diberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa maupun bagi penulis.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi mempunyai pengertian yang beraneka ragam menurut sudut pandang masing-masing ahli yang memberikan definisi akuntansi. Akuntansi Secara umum akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengumpulkan keputusan ekonomis. Pengertian ini menekankan pada peranan akuntansi, yaitu untuk memberikan informasi bagi kepentingan para pemakai daftar keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi tersebut merupakan akuntansi oleh financial Accounting Standard Board (FASB). American Institute Of Public Accountants (AICPA) melalui Committee on Terminology (1941) yang diterjemahkan oleh Hadibroto mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi adalah suatu keahlian untuk mencatat, mengklasifikasi dan mengikhtisarkan dengan cara yang tepat dan dinyatakan dengan uang, transaksi dan kejadian yang sebagai sekurang-kurangnya bersifat keuangan dan menginterpretasikan hasil yang diperoleh. Selain itu akuntansi adalah proses mengenali, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan.

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pemakainya.

Adapun menurut Sofyan Sayfri Harahap (2011:3) dalam bukunya yang berjudul Teori akuntansi adalah sebagai :

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu).

Menurut Herry (2012:7) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut: Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi merupakan kumpulan konsep dan teknis yang digunakan untuk mengukur dan melaporkan informasi keuangan dalam suatu unit usaha ekonomi.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari beberapa definisi akuntansi diatas bahwa akuntansi merupakan sebuah proses pengindentifikasian, penggolongan, pengukuran, pencatatan dan penyajian informasi mengenai transaksi-transaksi keuangan dalam perusahaan yang kegiatannya dapat diukur dengan satuan mata uang untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

## 2. Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan

Menurut Sujarwi (2015:17) Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

## 3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (IAI-KASP 2015:2-5) Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan
  - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  - 2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
  - 3) Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Dalam hal Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas tersebut, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.

- 4) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
  - 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pada APBDes tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - 6) Kepala Desa Memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
  - 7) Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
    - a. Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
    - b. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
    - c. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
    - d. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa Kepada Bupati/Walikota.
- b. Pelaksanaan
- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
  - 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  - 3) Pemerintahan desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
  - 4) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangkamenenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa.

- 5) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 6) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan.
- 7) Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 8) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

c. Penatausahaan

Bendahara desa wajib:

- 1) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Pajak.
- 2) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- 1) Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Semester Pertama.
- 2) Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir.

e. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- 1) Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenan.
  - a. Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - b. Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
  - c. Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lainnya.
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan

- 3) Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

#### 4. Pengertian Akuntansi Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 6 Tahun 2016 Akuntansi Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, kemudian disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menantausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

**a. Aspek-aspek dan karakteristik Akuntansi Keuangan Desa**

Adapun aspek-aspek dari akuntansi menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dala (IAI- KASP, 2015:6) adalah sebagai berikut:

1. Aspek Fungsi

Akuntansi menyajikan informasi kepada suatu entitas (misalnya Pemerintahan Desa) untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Fungsi tindakan tersebut adalah untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan entitas (misalnya Kepala Desa) yang dapat dimanfaatkan baik pihak internal maupun eksternal.

2. Aspek Aktivitas

Suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi data, menjadi sebuah data yang relevan, yang kemudian dianalisa dan diubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Sedangkan Karakteristik penting akuntansi desa meliputi hal-hal sebagai berikut menurut IAI-KASP, 2015:6 meliputi:

- a) Pengindetifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan
- b) Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data atau informasi dengan output informasi dan laporan keuangan
- c) Informasi keuangan terkait suatu entitas

- d) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai dalam pengambilan keputusan.

Aspek akuntansi itu sendiri memberikan arah bagi pengelola sumber daya untuk melaksanakan proses pengelolaan dan aset-asetnya secara profesional dan akuntabel. Proses akuntansi adalah proses pengelolaan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini harus disertai dengan bukti-bukti yang valid dan sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini maka diproses dalam pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

#### **b. Pengguna Akuntansi Keuangan Desa**

Menurut IAI-KASP (2015:6-7) Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi Keuangan Desa, di antaranya:

1. Pihak Internal.  
Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/ Kepala Seksi
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  
Badan Permusyawaratan membutuhkan informasi keuangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.
3. Pemerintah.  
Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.
4. Pihak Lainnya.  
Selain pihak-pihak yang disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.

### c. Prinsip-prinsip Akuntansi Keuangan Desa

Ada beberapa prinsip akuntansi keuangan desa menurut (IAI-KASP, 2015:7-8) adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (asset). Kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan atau dibayarkan dari kas atau bank.

#### 2. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (asset) dan berkurangnya utang tau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah Desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdsarkan jumlah kas yang diterima.

#### 3. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatnya.

#### 4. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

#### 5. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

### 5. Persamaan Akuntansi Keuangan Desa

Didalam IAI-KASP 2015 menjelaskan persamaan akuntansi keuangan desa merupakan gambaran antara elemen-elemen dalam sebuah laporan keuangan yang saling berhubungan. Terdapat 5 elemen pokok dalam laporan keuangan Desa, yaitu Aset, kewajiban, Pedapatan, Belanja, dan Kekayaan Bersih.

#### 1. Persamaan dasar akuntansi

Persamaan akuntansi dasar ini sangat sederhana dengan mengambil 3 elemen pokok dalam laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan kekayaan bersih, maka didapat rumusan persamaan akuntansinya sebagai berikut:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih}$$

2. Persamaan akuntansi yang diperluas

Persamaan akuntansi yang diperluas dari persamaan akuntansi dasar ini memiliki 2 rumus yaitu :

$$\text{Aset} + \text{Belanja} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih} + \text{Pendapatan} +/-$$

**Pembiayaan Netto**

Atau

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Kekayaan Bersih} + (\text{Pendapatan} - \text{Belanja}) +/-$$

**Pembiayaan Netto**

Unsur – unsur yang ada pada laporan keuangan desa dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Aset

Merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mana manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset dapat dikelompokkan dalam :

1. **Aset Lancar** yaitu asset yang dalam periode waktu tertentu (tidak lebih dari satu tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk asset lainnya. Misalnya kas, piutang, dan persediaan.
2. **Aset Tidak Lancar** yaitu asset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Misalnya investasi permanen, asset tetap, dana cadangan, asset tidak lancar lainnya.

b. Kewajiban

Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki. Kewajiban ini biasa berupa kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Misalnya utang kepada pihak ketiga, utang pemotongan pajak, utang cicilan pinjaman, pinjaman jangka panjang.

c. Kekayaan Bersih

Merupakan selisih antara asset yang dimiliki desa dengan kewajiban. Yang harus dipenuhi desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun.

d. Pendapatan

Merupakan penerimaan yang akan menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah desa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa.

e. Belanja

Merupakan semua pengeluaran oleh bendahara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah desa.

f. Pembiayaan

Merupakan setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

## 6. Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi menggunakan sebuah siklus akuntansi, artinya terdiri dari berbagai tahapan tertentu dan selesainya tahapan tersebut kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutan tertentu. Menurut IAI-KASP Tahun 2015 tahapan siklus akuntansi berupa:

- a. Tahap Pencatatan  
Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai
- b. Tahap Penggolongan  
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap pengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit.
- c. Tahap Pengikhtisaran  
Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat dibuku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakutran dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit didalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.
- d. Tahap Pelaporan  
Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini:
  - 1) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah des yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
  - 2) Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan ini berisi posisi asset lancer, asset tidak lancer, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

## 7. Dasar Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

### a. Sistem Pencatatan

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:44-51) adalah sebagai berikut:

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi. Yang dimaksud dengan pengidentifikasian adalah mengidentifikasi transaksi ekonomi, agar dapat membedakan yang mana transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak. Pada dasarnya ekonomi adalah aktivitas yang terkait dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dengan uang. Berikutnya adalah pencatatan ekonomi, adalah pengelolaan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan pengurangan atas sumber daya yang ada. Pelaporan ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:44-51) sistem pencatatan di dalam akuntansi terbagi menjadi tiga jenis yaitu sistem pencatatan *Single Entry*, *double entry* dan *triple entry*.

1. Single Entry  
Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.
2. Double Entry  
Sistem pencatatan *double entry* atau juga disebut dengan tata buku berpasangan adalah sistem pencatatan dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali. Pada sistem pencatatan *double entry* terbagi dua sisi yaitu debit disisi kiri dan kredit disisi kanan setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.
3. Triple Entry  
Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan mencatat pada buku anggaran. Sistem pencatatan *double entry* dijalankan pada pemerintah, pejabat penatausahaan keuangan (PKK) satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) maupun bagian keuangan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi tersebut

pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran.

### **b. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa**

Dasar pengakuan merupakan penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan sebagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012 : 46-51) adalah sebagai berikut:

1. Basis Kas (*cash basis*)  
Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.
2. Basis Akrua (*accrual basis*)  
Transaksi dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban atau ekuitas dana.
3. Basis Kas Modifikasian (*modified cash basis*)  
Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
4. Basis Akrua Modifikasian (*modified accrual basis*)  
Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

### **8. Asas Pengelolaan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember .

a. Transparan

yaitu prinsip terbuka – keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan 1 Cenik Ardana (2009:104) adalah sebagai berikut:

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

b. Akuntabel

Tata kelola Pemerintahan yang baik adalah salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability), Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban (vertical accountability) atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability), Pertanggungjawaban horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

### c. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Menurut Huraerah (2008:117) membagi partisipasi kedalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka
- 2) Partisipasi dalam bentuk iuran atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
- 3) Partisipasi dalam bentuk dukungan.
- 4) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) Partisipasi resrepresentatif dengan memberikan kepercayaan dan mandate kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

### 9. Laporan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni. V Wiratna 2015: 23-26 ada beberapa tahap pembuatan laporan keuangan desa sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku

kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku investaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.

4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan atau posisi keuangan desa.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran buatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Laporan keuangan yang dikemukakan oleh Sujarweni. V Wiratna 2015: 23-26 adalah:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa, anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- b. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasiperbankan atau

kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatan sebagai sumber dokumen transaksi.

c. Buku Kas Harian Pembantu

Buku kas harian pembantu adala buku yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja.

d. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

e. Buku Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

f. Buku Investaris Desa

Buku investaris yang digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa.

g. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan SPAP meyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya dalam suatu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

## 10. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai Laporan

Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati diawal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri:

- a. Format Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenan
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan; dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

## 11. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun. Laporan kekayaan Milik Desa terdiri dari tiga akun pokok yaitu aset desa, kewajiban, dan kekayaan bersih. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atau beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu berupa aset lancar dan tidak lancar. Contohnya aset tidak lancar adalah kas, piutang desa, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar meliputi modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi) dan aset non lancar lainnya. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Kekayaan bersih, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

### B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian adalah Penerapan Akuntansi keuangan pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Dengan waktu yang telah ditetapkan.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder:

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang pertama dicatat dan dikumpulkan berupa hasil wawancara secara langsung kepada bagian keuangan desa, proses penyusunan laporan keuangan desa, sistem pencatatan yang dilakukan pada desa sungai kayu ara kecamatan sungai apit kabupaten siak.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang peroleh dari Desa Sungai Kayu Ara dalam bentuk dokumen data-data mengenai laporan keuangan, struktur organisasi, berupa dokumen terkait dengan perencanaan dan pengelolaan Keuangan Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Data-data ini bersumber dari bendahara yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan tiga teknik yaitu:

#### 1) Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang mengenai aktivitas pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

#### 2) Dokumentasi

Melakukan pengumpulan data atau laporan yang diterima dari Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak baik berupa peraturan yang berhubungan dengan analisis penerapan akuntansi pada desa sungai kayu ara kecamatan sungai apit kabupaten siak.

### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam menyusun penelitian ini, maka penulis menggunakan Metode Deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian akan diambil kesimpulan.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI KAYU ARA

#### A. Sejarah Desa Sungai Kayu Ara

Desa Sungai Kayu Ara adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang salah satu dari 14 Desa 1 kelurahan pada awalnya merupakan perkampungan kecil dibawah kepemimpinan Ketua Desa yang bernama Bemo asal pertama kali Desa ini dirintis pada tahun 1902 oleh suku Domo dengan cara membuka hutan dan melakukan peladangan berpindah-pindah dan menamakan Desa dengan sebutan Sungai Penguling. Menurut sejarah dari beberapa tokoh masyarakat yang merupakan sesepuh Desa Sungai Kayu Ara bahwa sekitar tahun 1917 telah tumbuh berdiri sebatang pohon besar yang sangat rindang dan dibawahnya mengalir sungai kecil, pohon tersebut menjadi panduan arah khususnya bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dimana pohon tersebut tetap terlihat dari jauh karena ketinggian dan rindangnya. Pohon tersebut dikenal masyarakat dengan nama Pohon Ara atau Kayu Ara. Atas kesepakatan bersama pada tahun 1920 nama Desa Sungai Penguling akhirnya diubah menjadi Desa Sungai Kayu Ara diambil dari Sungai dan Pohon Ara.

Mulai saat itu dibentuk kepemimpinan Desa yang diberi nama Penghulu secara mufakat dipilih waktu itu Penghulu yang pertama bernama Penghulu Bemo. Yang menjabat sebagai Penghulu selama 4 tahun yaitu tahun 1920 sampai dengan 1924. Selanjutnya Penghulu Bemo digantikan secara musyawarah dan mufakat yaitu Penghulu yang kedua bernama Sopok yang menjabat sebagai Penghulu selama 5 tahun, mulai tahun 1924-1929. Setelah itu digantikan pula oleh

Penghulu Karim selama 8 tahun yaitu tahun 1930-1938, selanjutnya digantikan Penghulu Atim selama 6 tahun dari 1938-1944, selanjutnya digantikan pula oleh Penghulu Ibal selama 5 tahun yaitu tahun 1944-1949, selanjutnya diganti pula oleh Penghulu Arsyad selama 18 tahun yaitu tahun 1950-1968, selanjutnya digantikan pula oleh Penghulu A. Khalid selama 12 tahun yaitu tahun 1968-1981, pada masa pemerintahan penghulu A. Khalid tepatnya pada tahun 1981 kepemimpinan Desa dijabat oleh kepala Desa sementara (Pjs Kepala Desa) bernama Abdul Wahab selama 1 tahun, selanjutnya tahun 1990 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih sebagai Kepala Desa bernama Nurdin.K yang menjabat hanya sekitar 8 bulan karena meninggal dunia, selanjutnya pada tahun 1992 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dan terpilih sebagai Kepala Desa adalah Sudirman yang menjabat selama 9 tahun, yaitu dari tahun 1992-2001. Pada masa pemerintahan Kepala Desa Sudirman, tepatnya pada tahun 1999 terbentuk Kabupaten Siak, hasil dari Pemekaran dari kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2002 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa terpilih pula Saipul Bahri sebagai Kepala Desa dan menjabat selama 5 tahun sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak tahun 2002 yaitu sampai dengan tahun 2007, selanjutnya selama 1 tahun Kepala Desa Saipul Bahri dipercaya menjabat Kepala Desa sementara hingga tahun 2008, selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2008 dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan terpilih pula Kepala Desa bernama Zaini yaitu pada tahun 2008-2015. Pada masa pemerintahan Kepala Desa Zaini nama Desa Sungai Kayu Ara kembali dirubah menjadi Kampung Sungai Kayu Ara dilaksanakan oleh Pjs yang bernama Muhammad Yamin, selanjutnya dilakukan pula pemilihan

Penghulu Desa dan terpilih pula Penghulu bernama Baharudin yang menjabat saat ini.

Sejak tahun 1920 hingga sekarang telah terjadi penukaran Penghulu Desa sebanyak 15 kali. Sejak terbentuknya Kabupaten Siak berdasarkan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, hasil pemekaran dari daerah Kabupaten Bengkalis pelaksanaan pembangunan telah terasa pada masyarakat perkampungan hingga telah sampai dikawasan-kawasan yang tertinggal dan terisolir. Kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Sungai Kayu Ara dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Siak de depan dengan giatnya terus melaksanakan pembangunan disegala bidang, drngan mempercayai potensi sumber daya manusia melalui partisipasi peran serta swadaya masyarakat dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan.

Pada dasarnya masyarakat Melayu tempatan cukup cenderung sulit untuk berpartisipasi dalam melaksanakan Gotong Royong ternyata masyarakat Desa Sungai Kayu Ara memiliki partisipasi tinggi untuk ikut melaksanakan pembangunan. Hal ini berkat kesamaan pandangan dari persepsi antara pemerintahan Desa Sungai Kayu Ara dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sungai Kayu Ara. Keberhasilan pembangunan di Desa Sungai Kayu Ara tidak terlepas dari peranan wanita yang aktif mendukung pelaksanaan pembangunan melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-bu dalam suatu wadah PKK Desa Sungai Kayu Ara yang punya arti dan nilai tersendiri yang tidak boleh dipandang atas pengabdianya dalam mendukung pembangunan di Desa. Tinggi kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa Sungai Kayu Ara dalam melaksanakan

pembangunan sehingga sifat gotong royong yang sudah melembaga di masyarakat menjadi kenyataan, hal ini dibuktikan keikutsertaan Desa Sungai Kayu Ara dalam lomba Desa tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten Siak, tingkat Provinsi Riau dan tingkat Nasional pada tahun 2004, dan berhasil menjadi juara Nasional 2004 tersebut merupakan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sungai Kayu Ara.

Desa Sungai Kayu Ara terletak di dalam wilayah Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kayu Ara Permai
2. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Lalang
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lalang
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sungai Apit, Desa Parit I/II dan Desa Harapan.

Luas wilayah Desa Sungai Kayu Ara adalah 169,3 Ha berupa daratan dimana 75% dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan Karet dan Sawit dan 25% untuk perumahan masyarakat Desa. Iklim Desa Sungai Kayu Ara, sebagaimana Desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit.

#### B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

2. Sekretaris

Sekretaris bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi desa, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Kepala Seksi

Kepala seksi adalah seseorang yang ditunjuk oleh kepala desa sebagai pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan masing-masing.

4. Bendahara

Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menata-usahakan dan mempertanggungjawaban pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.



## C. Visi dan Misi

### 1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Sungai Kayu Ara dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pihak berkepentingan di Kampung seperti Pemerintahan Desa, Penghulu Desa, Perangkat Desa, BAPEKAM, Tokoh Agama, Lemabaga Masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Dari pendekatan partisipatif seperti yang dimaksud diatas pembangunan yang sangat dibutuhkan adalah pada sektor infrastruktur dan perekonomian terutama melalui pertanian maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Sungai Kayu Ara adalah:

Terwujudnya Desa Sungai Kayu Ara Yang Aman, Damai Dan Sejahtera Melalui Pembangunan Segala Bidang Yang Berkelanjutan Menuju Kemajuan Desa Yang Bermatabat Dan Agamis.

### 2. Misi

Untuk mencapai Visi Desa Sungai kayu Aram aka dijabarkan melalui Misi untuk dapat dioperasionalkan atau dilaksanakan dalam penyusunan Misi juga digunakan partisipatif , pertimbangan potensi dan kebutuhan masyarakat Desa Sungai Kayu Ara.

Dari proses yang dilakukan maka Misi Desa Sungai Kayu Ara salaha sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan Desa yang efektif dan efisien dalam mengoptimalkan pelayan kepada masyarakat.

2. Menghidupkan dan meningkatkan kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.
3. Membentuk kelompok atau lembaga-lembaga yang dianggap perlu sebagai mendukung dan mengontrol terwujudnya visi Desa.
4. Memajukan sumber daya manusia melalui peningkatan sarana prasarana pendidikan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pertanian dan sektor ekonomi kampung yang berbasis ekonomi kerakyatan.
6. Memupuk dan memelihara semangat persatuan, meningkatkan peran serta aktif partisipasi dan gotong royong masyarakat.
7. Mengembangkan pentingnya sumber daya manusia melalui dukungan program wajib belajar 12 tahun.
8. Mengupayakan pendidikan-pendidikan non formal baik dibidang umum maupun dibidang kaagamaan melalui sosialisasi, pelatihan dan pengajian menuju sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan agamis.
9. Menjadikan Desa Sungai Kayu Ara yang lebih maju dengan peningkatan sarana dan prasarana umum bagi pelayanan masyarakat, dibidang ekonomi, sosial, budaya dan agama.
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pembinaan Posyandu dan Pustu (Puskesmas Pembantu).

## D. Kebijakan Desa

### 1. Arah kebijakan Pembangunan Desa

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dari Desa Sungai Kayu Ara ditahun 2015-2021 arah kebijakan pembangunan Desa diprioritaskan pada bidang:

- a. Peningkatan hasil pertanian dan keanekaragaman jenis usaha dengan sistem intensifikasi.
- b. Pengadaan dan perbaikan sarana infrastruktur, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- c. Pengadaan permodalan bagi masyarakat dan perluasan lapangan kerja termasuk manajemen usaha.
- d. Peningkatan keterampilan dan sumber daya manusia

Pencapaian dari arah kebijakan diatas akan dilakukan melalui ketertiban dan partisipasi masyarakat dengan sistem perencanaan dan pelaksanaan partisipatif.

### 2. Potensi dan Masalah

Dari hasil pengkajian keadaan Desa melalui metode MMDK (Mengagas Masa Depan Desa) maka ditentukan berbagai masalah dan potensi yang ada di Desa Sungai Kayu Ara yang menjadi pedoman di dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Desa tahun 2021. Potensi dan permasalahan yang dapat diidentifikasi ditingkat Dusun dan Desa meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, sosial budaya, pemerintahan, perikanan dan pertanian.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sitem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Dalam sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum yang digunakan oleh Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak terhadap transaksi yang terjadi berdasarkan pencatatan *single entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal.

Desa Sungai Kayu Ara menggunakan dasar pengakuan *Cash Basic* dalam menggunakan pencatatan transaksi ke dalam buku kas umum *Cash Basic* adalah dasar pengakuan akuntansi dimana transaksi diakui atau dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan.

#### B. Tahap Pencatatan

Dalam sistem pencatatan penerimaan dan pencatatan Buku Kas Umum yang digunakan oleh Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak terhadap transaksi yang terjadi yaitu berdasarkan pencatatan *single entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Untuk pengakuan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang dilakukan pada Kampung Sungai Kayu Ara Kabupaten Siak Kabupaten Siak menggunakan *Cash Basic*, dimana pencatatan dilakukan ketika transaksi terjadi dan uangnya benar-benar diterima.

Semua proses akuntansi keuangan desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dimulai dengan mengumpulkan semua bukti

transaksi buku kas umum-tunai (Lampiran 3), buku pembantu pajak (Lampiran 4), buku bank desa (Lampiran 5) maka tahap selanjutnya adalah penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Lampiran 1) dan Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 2).

### 1. Buku Kas Umum- Tunai

Buku Kas Umum-Tunai (Lampiran 3) digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Buku Kas Umum yang terjadi pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

**Tabel V.1**  
**Buku Kas Umum-Tunai**  
**Sungai Kayu Ara**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Tgl	Rek	Keterangan	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	19/05/2017		ADK Tahap 1 2017	275.591.811	
2	19/05/2017		Penghasilan tetap dan tunjangan penghulu dan perangkat		153.510.000
3	19/05/2017		Operasional perkantoran		20.653.496
4	19/05/2017		Operasional RK/RW		23.800.000

Sumber : Desa Sungai Kayu Ara

## 2. Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Pajak (Lampiran 4) adalah salah satu pembukuan atau penantausahaan bendahara desa untuk digunakan mencatat semua penerimaan dan pengeluaran pajak dimana buku pembantu pajak berisikan nomor urut penerimaan dan pengeluaran kas. Buku Pembantu Pajak pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Kabupaten Siak sudah sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

**Table V.2**  
**Buku Pembantu Pajak**  
**Sungai Kayu Ara**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Tanggal	Keterangan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo
1	19/05/2015	00012/KWT/02.08/2017 Makanan Harian Bulan Febuari Tahap 1 2017	42.500	0	42.500
2	19/05/2015	00017/KWT/02.08/2017 Biaya Snack Kegiatan Rapat BAPEKAM Bulan Desember (Kurang Bayar 2016)	6.750	0	49.250
3	19/05/2015	00031/KWT/02.08/2017 Minuman Harian Kantor Bulan Januari Tahap 1 2017	40.500	0	89.750
4	19/05/2015	00036/KWT/02.08/2017 Makanan Rapat Kampung Bulan Febuari Tahap 1 2017	73.100	0	162.850

Sumber : Desa Sungai Kayu Ara

### 3. Buku Bank Desa

Buku Bank Desa (Lampiran 5) digunakan untuk mencatat masuk dan keluarnya uang dalam kas dibank. Buku Bank Desa pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Kabupaten Siak sudah sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).

**Tabel V.3**  
**Buku Bank Desa**  
**Sungai Kayu Ara**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Tgl	Keterangan	No. Bukti	Pemasukan	Pengeluaran	Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Penarikan (Rp)	
1	2	3	4	5	7	10
1	04/05/2017	Penerimaan ADK	003/TBP/02.08/2017	99.268.784		99.268.784
2	04/05/2017	Dana Kampung Tahap 1 2017	004/TBP/02.08/2017	474.634.078		573.902.862
3	04/05/2017	ADK Tahap 1 Kurang Bayar 2017	003/MKAS/02.08/2017		164.119.000	409.783.862

Sumber : Desa Sungai Kayu Ara

#### C. Tahap Penggolongan

Dalam tahap penggolongan dibuat buku besar dan buku besar pembantu yang digunakan untuk mengelompokkan semua transaksi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Desa Sungai Kayu Ara melakukan tahap penggolongan dengan mengelompokkan transaksi yang terjadi sesuai dengan jenis

kegiatan yang dilakukan hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan desa digolongkan berdasarkan akun kegiatan yang dilakukannya, seperti penerimaan dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dan dana desa, bantuan keuangan provinsi, keuangan kabupaten/kota dicatat dalam akun penerimaan bank dan jenis kegiatan yang dilakukan. Seharusnya Buku Besar dikelompokkan berdasarkan jenis akunnya bukan berdasarkan jenis kegiatannya.

Berdasarkan uraian di atas tahap penggolongan yang dilakukan pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum sesuai dengan IAI-KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

#### D. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap pengikhtisaran Desa Sungai Kayu Ara tidak membuat Neraca Saldo dan Kertas Kerja atau Neraca Lajur.

##### **1. Neraca Saldo**

Setelah semua transaksi dicatat kedalam buku besar dan buku besar pembantu. Selanjutnya membuat neraca saldo. Tetapi Desa Sungai Kayu Ara tidak membuat Neraca Saldo. Seharusnya menurut IAI-KASP 2015 dalam Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, setelah semua transaksi dicatat pada BKU dan Buku Besar, tahap berikutnya adalah tahap pengikhtisaran dari Buku Besar ke Neraca Saldo. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk menyakinkan bahwa proses yang dilakukan pencatatannya dengan benar.

##### **2. Neraca Lajur**

Selanjutnya neraca lajur yang digunakan untuk memudahkan dalam pembuatan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan Kekayaan

Milik Desa. Tetapi Desa Sungai Kayu Ara tidak membuat Neraca Lajur, seharusnya menurut IAI-KASP 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, terhadap siklus akuntansi keuangan desa tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran dengan membuat kertas kerja (Neraca Lajur).

#### E. Pengumpulan Data Penyesuaian

Sebelum menyusun laporan keuangan Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak tidak mengakumulasikan data penyesuain. Berikut beberapa yang harus kita lakukan:

##### 1. Bahan Habis Pakai

Bahan habis pakai adalah barang yang hanya dapat dipergunakan dalam satu kali pemakaian . Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa pada tahun 2017 belanja barang dan jasa persediaan alat tulis kantor Rp.1.874.000 dibelanjakan Rp. 1.305.000 maka dapat sisa persediaan Rp. 569.000 dan benda pos dan materai Rp. 3.468.000. jika diasumsikan pada akhir periode Rp.400.000.

Namun dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) persediaan benda pos materai serta alat tulis kantor bernilai 0, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Jurnal penyesuaian :

31/12/2017	Persediaan Benda Pos dan Materai	Rp. 400.000
	Belanja Benda Pos dan Materai	Rp. 400.000
31/12/2017	Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 569.000
	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp. 569.000

## 2. Penyusutan Aset Tetap

Asset tetap merupakan aktiva yang terwujud untuk dipakai dalam jangka panjang dengan nilai ekonomis yang relatif besar. Asset tetap yang tertera pada pada laporan keuangan Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yaitu (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan instalasi) disajikan dalam nilai perolehan aktiva tetap tanpa mengurangi akumulasi penyusutan sehingga tidak menunjukkan hasil sebenarnya.

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa, asset tetap peralatan dan mesin tahun 2017 sebesar Rp 3.550.000, gedung dan bangunan Rp 187.897.796 dan jalan, jaringan dan instalasi Rp 599.229.962. Umur ekonomis yang ditaksir 5 tahun pada peralatan dan mesin, 10 tahun pada gedung dan bangunan, dan 20 tahun pada jalan, jaringan dan instalasi terdapat akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus berikut ini:

### a. Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan : Rp 3.550.000

Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan Pertahun} = \frac{\text{Rp } 3.550.000}{5 \text{ Tahun}}$$

$$= \text{Rp. } 710.000$$

Jurnal yang harus dibuat:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                      Rp 710.000

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                      Rp 710.000

## b. Gedung dan Bangunan

Nilai Perolehan : Rp 187.897.796

Metode Garis Lurus

Penyusutan Tahunan =  $\frac{\text{Rp } 187.897.796}{10 \text{ Tahun}}$

= Rp 18.789.780

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 18.789.780

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 18.789.780

## c. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Perolehan : Rp 599.229.962

Metode Garis Lurus

Penyusutan Tahunan =  $\frac{\text{Rp } 599.229.962}{20 \text{ Tahun}}$

= Rp 29.961.498

Beban Peny Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 29.961.498

Akumulasi Peny Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 29.961.498

Jadi jumlah Akumulasi Penyusutan aset tetap tersebut dapat disajikan di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa yang dapat mempengaruhi akun ekuitas.

## F. Penyajian Laporan Keuangan

## 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah laporan yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau perubahan untuk suatu

anggaran tertentu. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes pada Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sudah membuat sesuai dengan IAI-KASP 2015 tentang Pedoman Asistensi Keuangan Desa dan PABU.

## 2. Laporan Kekayaan Milik Desa.

Laporan Kekayaan Milik Desa adalah Laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan bersih desa pada periode satu tahun. Desa Sungai Kayu Ara sudah membuat Laporan Kekayaan Milik Desa tetapi cara tempat penyajian laporan kekayaan milik desa masih keliru. Karena tidak menghitung akumulasi penyusutan.

Desa Sungai Kayu Ara tidak menghitung nilai persediaan pada akhir periode. Pada tahun 2017 belanja barang dan jasa (persediaan benda pos dan materai dengan biaya pengeluaran sebesar Rp. 3.468.000, persediaan alat tulis kantor sebesar Rp. 18.115.100 dapat dilihat pada Lampiran 2) dan lainnya sehingga saldo pada Laporan Kekayaan Milik Desa Sungai Kayu Ara nol (0).

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Sungai Kayu Ara tahun 2016 terdapat peralatan dan mesin senilai Rp. 133.940.000, gedung dan bangunan senilai Rp.199.300.990, jalan, jaringan dan instalasi Rp. 385.249.826. Akan tetapi asset tetap pada tahun 2016 senilai Rp. 790.677.758 tidak dimasukkan sebagai penambahan asset tetap untuk tahun 2017 (Lampiran 2). Hal ini dikarenakan SISKEUDES yang digunakan oleh Desa Sungai Kayu Ara Tahun 2017 tidak

disediakan tempat untuk menulis laporan tahun 2016 atau bias dikatakan mempunyai versi yang berbeda antara aplikasi 2017 dan 2016.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka pada bab ini penulis menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat.

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam dasar pengakuan akuntansi Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menggunakan basis kas (*cash basis*), kas basis berarti semua transaksi semua transaksi baik pendapatan maupun pengeluaran akan dicatat saat kas telah diterima atau dikeluarkan.
2. Dalam proses akuntansi pada Desa Sungai Kayu Ara Kabupaten Siak belum membuat Neraca Saldo dan Neraca Lajur.
3. Dalam pengumpulan data penyesuaian, Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak belum membuat data penyesuaian.
4. Desa Sungai Kayu Ara sudah membuat asset tetap yang meliputi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. Nilai aktiva tetap ini disajikan berdasarkan nilai perolehan tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

## B. SARAN

1. Sebaiknya Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak menggunakan sistem pencatatan berpasangan dimana transaksi akan dicatat pada kolom debit dan kredit, sehingga semua transaksi dapat dicatat dengan rinci.
2. Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak seharusnya menggunakan dasar pengakuan berbasis akrual karena tidak semua transaksi didesa itu bersifat tunai, baik itu pendapatan maupun belanja. Akrual berarti semua transaksi akan dicatat dan dibuku tanpa memperhatikan apakah kas telah diterima atau dikeluarkan.
3. Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebaiknya membuat data penyesuaian sebelum membuat Laporan Keuangan Desa.
4. Desa Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak sebaiknya menghitung akumulasi penyusutan tetap, agar Laporan kekayaan milik desa memiliki nilai wajar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan 1 Cenik Ardana. 2009. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: Salemba Empat
- Firmansyah, Amrie. 2018. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Rawa Burung Kabupaten Tangerang Banten. Politeknik Keuangan Negara STAN. Banten
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi. Salemba Empat : Jakarta
- Hanifah, Suci Indah. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya
- Herry, S.E, M.Si. (2012:7). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Huraerah, Abu. 2008. Pengorganisasian dan Pengemangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan. Bandung : Humaniora
- IAI-KASP, 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Ikatan Akuntan Indonesia
- Laurentya, Mayela.Vica. 2017. Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APBDesa dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Universitas Islam Negeri. Malang
- L Manik, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Lestari, Sri. 2017. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Banyudono. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Surakarta
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Riyanto, Andi.Dkk. 2016. Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa. SNIPTEK
- Ruru, Dkk. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Suan Kecamatan Kalawat. Kabupaten Minahasa Utara